

SKRIPSI

IMPLIKASI KOALISI FRAKSI PENDUKUNG PRESIDEN TERHADAP

FUNGSI LEGISLASI PRESIDEN

(STUDI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO PERIODE II DAN PRESIDEN JOKO WIDODO PERIODE II)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program S1 Fakultas



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

No. Reg: 3/PK-V/I/2021

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa: Nikko Anderson	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 25 Mei 1998 b) Nama Orang Tua : Sonni Edward c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Tata Negara e) NIM : 1610113082	f) Tanggal lulus: 12 Januari 2021 g) Predikat lulus: Sangat Memuaskan h) IPK : 3,89 i) Lama Studi: : 4 Tahun 6 Bulan j) Alamat : Padang, Sumatera Barat	

**IMPLIKASI KOALISI FRAKSI PENDUKUNG PRESIDEN TERHADAP FUNGSI LEGISLASI
PRESIDEN
(STUDI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE II DAN
PRESIDEN JOKO WIDODO PERIODE II)**

Nikko Anderson, 1610113082, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 155 halaman, Tahun 2021

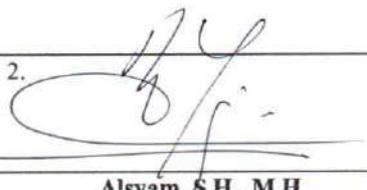
ABSTRAK

Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II dan Presiden Joko Widodo II didukung oleh koalisi fraksi dengan suara masing-masing yaitu 75,54% dan 74,39% dari total suara DPR. Koalisi ini diharapkan menjadi jalan bagi Presiden untuk mengamankan pemerintahannya. Melalui dukungan fraksi ini akan dilihat bagaimana implikasi koalisi fraksi Presiden khusus pada fungsi legislasi Presiden. Rumusan masalah yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana komposisi dan dinamika koalisi fraksi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II dan Presiden Joko Widodo II serta bagaimana pengaruh koalisi tersebut terhadap fungsi legislasi Presiden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif serta melalui proses penelitian yang dilaksanakan dengan penelusuran kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data hasil perolehan suara Pemilu dan data evaluasi Prolegnas, serta berupa bahan-bahan hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi fraksi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II dan Presiden Joko Widodo II tergolong besar. Akan tetapi, koalisi tersebut bersifat lemah karena dibangun bukan berdasarkan basis yang kuat sehingga memunculkan dinamika di luar ekspektasi yang mengancam keutuhan koalisi. Selanjutnya, koalisi mayoritas mutlak tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan realisasi Prolegnas. Artinya, koalisi 'gemuk' tidak mendorong produktivitas Presiden dan DPR dalam merealisasikan Prolegnas. Faktor yang menyebabkan tidak optimalnya realisasi Prolegnas adalah kinerja DPR itu sendiri. Implikasi koalisi pendukung Presiden baru menampakkan wajahnya pada proses pembahasan bersama suatu RUU. Terbukti bahwa koalisi mayoritas mutlak ini memberikan andilnya dengan peran mempercepat proses pembahasan suatu RUU. Ada beberapa RUU kontroversial yang mendapat perlawanan dari masyarakat, tetapi menjadi cepat prosesnya karena suara mayoritas pendukung Presiden berhasil menekan hambatan-hambatan yang muncul di parlemen.

Sketsa ini telah dipertahankan di depan tim pengujian dan dinyatakan lulus pada tanggal 12 Januari 2021.

Abstrak telah disetujui oleh pengujian.

Pengujian,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama	Deflina Gusman, S.H., M.H.	Alsyam, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara: **Afriani, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Petugas Fakultas/Universitas Nama: _____ Tanda Tangan: _____
No. Alumni Universitas	Nama: _____ Tanda Tangan: _____